

BAB II

GAMBARAN UMUM/PERUSAHAAN/ORGANISASI

2.1 Tentang BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bapenda berperan penting dalam mengelola unsur penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Bapenda memiliki fungsi utama merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan, serta mengelola administrasi terkait dengan berbagai jenis pajak daerah, perencanaan, pelaporan, regulasi pendapatan daerah, serta pengawasan dan pengendaliannya.

Peran Bapenda dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakannya secara efektif, termasuk mengelola pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB, pajak daerah non PBB-P2 dan BPHTB, perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah, serta pengawasan dan pengendaliannya, yang menjadikannya berperan penting dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.1 Logo BAPENDA.
(Sumber: Dokumen Instansi, 2024).

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

2.2 Visi Misi BAPENDA

BAPENDA sebagai dinas pajak di Kabupaten Tangerang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera.

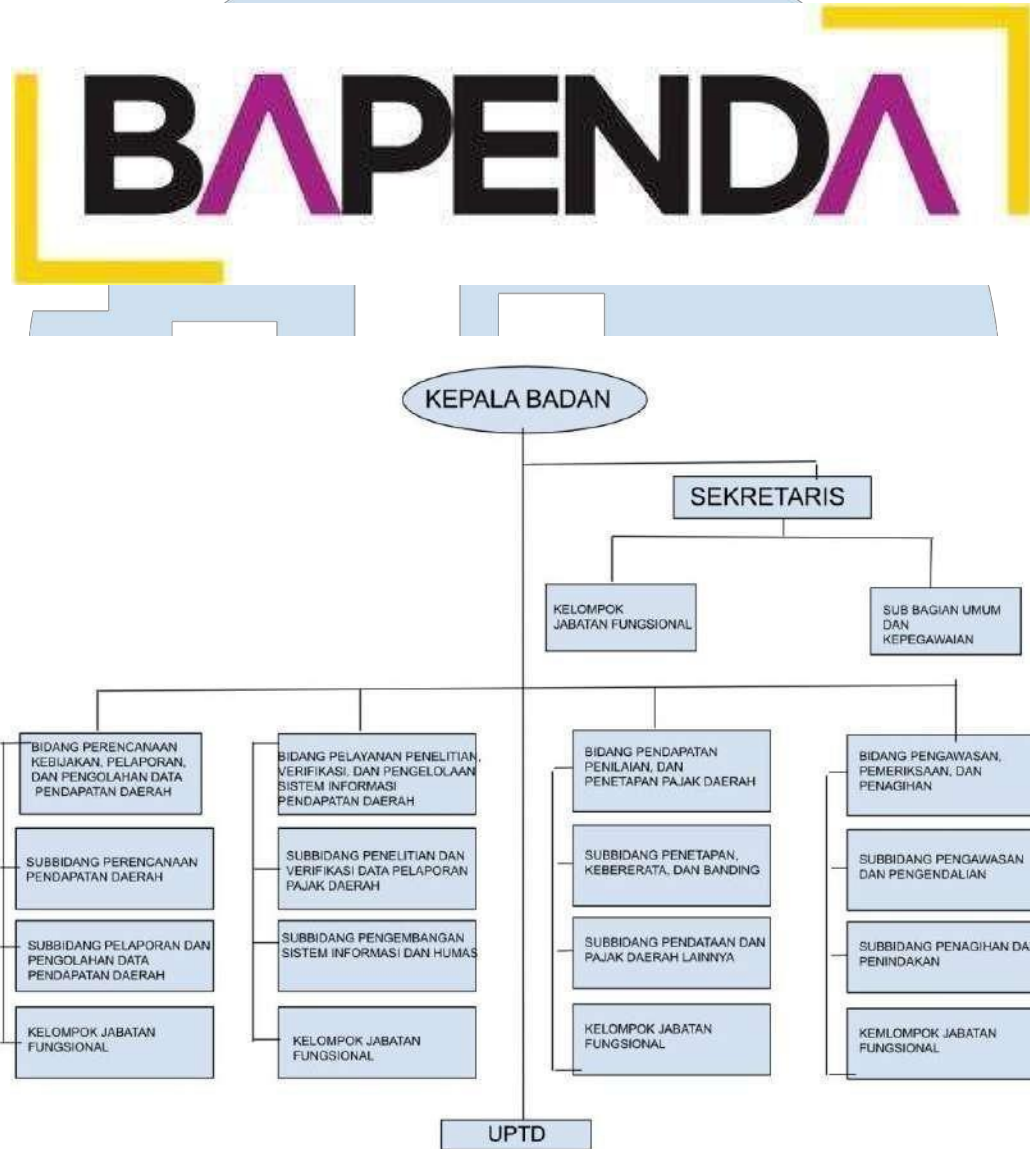
MISI

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
2. Meningkatkan akses mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

U M M N

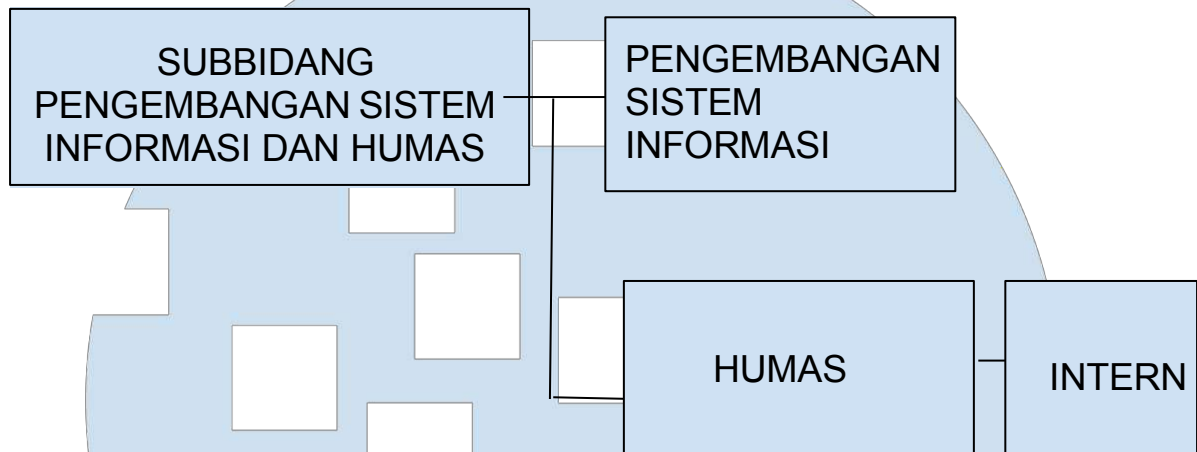
U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

2.3 Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Tangerang



Gambar 2.2 Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Tangerang
(Sumber: Dokumen Instansi, 2024)

2.4 Struktur Divisi



Gambar 2.3 Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Tangerang
(Sumber: Dokumen Instansi, 2024)

Divisi Sistem Informasi di Bapenda bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sistem informasi termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Selain itu SI juga bertanggung jawab untuk mengelola *website* dan media sosial Bapenda Kabupaten Tangerang. Sedangkan divisi Humas bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program, kegiatan, dan kebijakan Bapenda, mempermudah akses informasi bagi masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Bapenda. Berikut yang merupakan masing-masing *job description* posisi pada Sub bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Humas:

A. Pengembangan Sistem Informasi

Flow kerja pada divisi SI melalui beberapa tahap penting, diawali dengan analisis kebutuhan untuk memahami keinginan masyarakat dan instansi. Tahap selanjutnya adalah studi kelayakan untuk menilai kelayakan proyek SI secara teknis, dan operasional. Jika mendapatkan perizinan dari kepala bidang, dibuatlah perencanaan sistem yang detail, termasuk ruang lingkup, jadwal, anggaran, dan sumber daya. Memasuki tahap perancangan desain, database, dan algoritma. Berikutnya, implementasi dilakukan dengan pemrograman, pengujian sistem. Tahap terakhir adalah operasi dan pemeliharaan, di mana sistem dipantau, diperbarui, dan disesuaikan dengan kebutuhan yang berubah. Selain itu, SI juga

bertanggung jawab mempublikasikan konten-konten informasi digital dari humas pada website dan media sosial instansi.

B. Hubungan Masyarakat

Dengan menjalankan tanggung jawabnya dalam menyusun dan menyebarkan informasi tentang program, kegiatan, dan kebijakan Bapenda kepada publik serta mengembangkan strategi dan program komunikasi publik yang inovatif dan kreatif. Terdapat *flow* kerja pada proses pembuatan hingga proses publikasinya, diawali dengan perencanaan dan strategi konten informasi yang diperintahkan oleh *supervisor* atau kepala divisi, lalu produksi konten yang menghasilkan berbagai konten digital, seperti *press release*, infografis, video, dan konten media sosial. Tahap terakhir yaitu pengajuan perizinan sebelum konten dipublikasi untuk di review terlebih dahulu oleh *supervisor* dan kepala bidang, hingga konten digital yang dihasilkan mendapatkan *approval* untuk dipublikasikan melalui website, media sosial, dan media massa oleh tim SI.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA